

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kota Padang Panjang sebagai kota non-IHK, melakukan pemantauan harga pangan sebagai kebijakan dalam pengendalian inflasi daerah. Dalam pelaksanaannya, melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kota Padang Panjang, pemantauan harga dilakukan setiap hari kerja langsung ke Pasar Pusat Padang Panjang. Kedua dinas tersebut melakukan pemantauan harga untuk 48 komoditas yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

1. Beras Kualitas I
2. Beras Kualitas II
3. Beras Kualitas III
4. Gula Pasir
5. Minyak Goreng Kemasan Sederhana
6. Minyak Goreng Kemasan Premium
7. Minyak Goreng Curah
8. Tepung Terigu Segitiga Biru
9. Tepung Terigu Cakra
10. Tepung Terigu Kencana
11. Daging Sapi
12. Daging Ayam Broiler
13. Daging Ayam Kampung Besar
14. Daging Ayam Kampung Sedang
15. Daging Ayam Kampung Kecil
16. Telur Ayam Broiler
17. Telur Ayam Kampung
18. Telur Itik
19. Cabai Hijau
20. Cabai Rawit
21. Cabai Merah
22. Bawang Merah
23. Bawang Putih
24. Susu Kental Manis (Bendera)
25. Susu Kental Manis (Indomilk)
26. Susu Bubuk 400gr
27. Susu Bubuk (Indomilk) 400gr
28. Garam Beryodium Kasar
29. Garam Beryodium Halus (250gr)
30. Kacang Kedele
31. Kacang Hijau
32. Kacang Tanah
33. Mie Instant
34. Ikan Asin Teri
35. Ketela Pohon
36. Jagung Pipilan
37. Gas 3 kg
38. Bawang Daun
39. Terong

40. Seledri
41. Bawang Bombai
42. Ikan Air Tawar (Nila)
43. Ikan Kembung
44. Jeruk
45. Pisang Lokal
46. Tahu
47. Tempe
48. Udang

Berdasarkan hasil pemantauan harga selama Triwulan 1 tahun 2024, maka terdapat beberapa komoditi yang mengalami perubahan harga signifikan ($\geq 20\%$) hingga akhir triwulan 1, yaitu:

1. Harga rata-rata Seledri yang mengalami kenaikan harga sebesar 55%
2. Harga rata-rata Cabai Merah yang mengalami penurunan harga sebesar -24,82%.

Perkembangan Indeks Perkembangan Harga Kota Padang selama Triwulan I 2024

Bulan	Minggu	IPH	Komoditas penyumbang Harga	Kesimpulan
Januari 2024	Jan-01	-1,186	CABAI MERAH(-2.505);SUSU BUBUK(-0.094);GULA PASIR(-0.068)	Komoditas utama penyumbang penurunan IPH bulan Januari adalah Cabai Merah, Susu Bubuk, pisang dan gula pasir
	Jan-02	-1,822	CABAI MERAH(-3.321); SUSU BUBUK(-0.111); GULA PASIR(-0.085)	
	Jan-03	-2,12	CABAI MERAH(-3.482), PISANG(-0.168), SUSU BUBUK(-0.1156)	
	Jan-04	-2,116	CABAI MERAH(-3.503); PISANG(-0.154); SUSU BUBUK(-0.118)	
Februari 2024	Feb-01	0,995	Cabai Merah(1.075); Minyak Goreng(0.287); Telur Ayam Ras(0.127)	Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH bulan Februari adalah Cabai merah, Minyak goreng, telur ayam ras, dan Daging Ayam Ras
	Feb-02	1,312	Cabai Merah(1.366); Minyak Goreng(0.277); Telur Ayam Ras(0.11)	
	Feb-03	2,381	Cabai Merah(2.157); Minyak Goreng(0.325); Telur Ayam Ras(0.117)	
	Feb-04	3,651	Cabai Merah(3.092); Minyak Goreng(0.359); Daging Ayam Ras(0.273)	
	Feb-05	5,069	Cabai Merah(4.083); Daging Ayam Ras(0.389); Minyak Goreng(0.385)	

Maret 2024	Mar-01	4,455	Cabai Merah(2,349); Beras(0,676); Daging Ayam Ras(0,398)	Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH bulan Maret adalah Cabai merah, beras, daging ayam ras dan bawang merah
	Mar-02	7,039	Cabai Merah(4,943) Beras(0,676); Daging Ayam Ras(0,35)	
	Mar-03	4,195	Cabai Merah(2.106); Beras(0.676); Bawang Merah(0.329)	
	Mar-04	3,30	Cabai Merah(1.21); Beras(0.676); Bawang Merah(0.331)	

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pemantauan perkembangan harga selama Triwulan 1 tahun 2024, terdapat 2 komoditas yang mengalami fluktuasi harga sangat signifikan, yaitu, Seledri dan Cabai Merah. Pada komoditas cabai terjadi penurunan harga dikarenakan mulai masuknya cabai dari daerah sentra seperti Lampung dan Aceh, sehingga dapat memenuhi kekurangan pasokan dari petani lokal.

Pada komoditas Seledri terjadi kenaikan harga yang cukup besar karena masih pengaruh imbas erupsi G. Marapi sejak 3 Desember 2023 yang menyebabkan rusaknya sebagian tanaman petani dan mengurangi hasil produksi. Kurangnya stok mengakibatkan harga di tingkat konsumen meningkat. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem selama periode triwulan 1 juga menurunkan jumlah produksi hasil tani sehingga semakin memicu kenaikan harga di akhir triwulan 1.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

TPID Kota Padang Panjang tetap melakukan pemantauan harga secara kontinyu harian untuk mengontrol dan menjaga daya beli masyarakat. Pemantauan harga dilakukan dengan berkoordinasi dengan OPD terkait, yaitu Dinas Pangan Pertanian dan Dinas Perdagkop UKM Kota Padang Panjang ke Pasar Pusat Padang Panjang dan produsen setiap hari kerja.

Sedangkan informasi harga pangan ini ditampilkan setiap hari melalui web aplikasi [infopangan.padangpanjang.go.id](https://info-pangan.padangpanjang.go.id). Dengan demikian siapa saja yang ingin mengetahui informasi harga pangan di Kota Padang Panjang hari ini dapat mengaksesnya melalui web aplikasi <https://info-pangan.padangpanjang.go.id/>.

Selama Triwulan 1 Tahun 2024, TPID Padang Panjang telah melakukan berbagai kegiatan yang termasuk ke dalam kebijakan pengendalian inflasi, yaitu:

1. Penyerahan Bantuan Bantuan Sosial Tidak Terencana bersumber dari Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Kota Padang Panjang bagi petani yang terdampak erupsi Gunung

Marapi. 419 petani menerima bantuan uang tunai sebesar Rp500.000/KK yang diserahkan pada tanggal 28 Maret 2024.

2. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah sebanyak 3 kali dalam periode Triwulan 1 2024 yaitu tanggal 26 Januari, 7 dan 8 Maret 2024.
3. Subsidi transportasi yang bersumber dari APBD dalam mendukung kegiatan Operasi Pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk menjaga kestabilan harga beras pada tingkat konsumen di Kota Padang Panjang.
4. Pencanaan Gerakan Menanam Cabai sebagai langkah pengendalian inflasi untuk menormalkan harga di pasar tanggal 8 Maret 2024.
5. Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah yang bekerjasama dengan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) Provinsi Sumatera Barat.
6. Penyaluran Bantuan Pangan Beras untuk 2.455 KK dari bulan Januari – Maret 2024 untuk menahan kenaikan harga beras masing-masing 10 Kg/KK/bulan.
7. Penyaluran Permakanan (Beras, telur, Sarden dan Minyak Goreng) sebanyak 262 orang PPKS Penyandang Disabilitas dan lansia senilai Rp. 250.000/paket. Yang terdiri dari 116 orang lanjut Usia dan 146 Penyandang Disabilitas yang disalurkan pada tanggal 26 sd 28 Maret 2024 dengan realisasi anggaran APBD sebesar Rp138.419.750.
8. Bantuan premi AUP Kota Padang Panjang Tahun 2024 dialokasikan pada APBD sebanyak Rp5.292.000 untuk lahan sawah seluas 147 hektar yang merupakan 20% dari biaya polis, sedangkan 80% biaya polis lainnya ditanggung oleh Kementerian Pertanian/APBN (sebesar Rp21.168.000). Adapun nilai pertanggungan AUP ini adalah sebesar Rp6.000.000/hektar

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penerapan kebijakan pemantauan harga bahan pangan dan stok bahan pokok dan barang penting secara kontinyu, memberi dampak dalam pengendalian harga di pasar. Di samping itu, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam menjaga daya beli masyarakat dan harga jual bahan pangan di pasar karena dapat diidentifikasi lebih awal jika terjadi fluktuasi, gejolak dan permasalahan harga yang besar dan terjadi dalam pemantauan harga tersebut.

Kebijakan pengendalian inflasi daerah selama triwulan 1 2024 juga telah dilaksanakan evaluasi dan penyampaian laporan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan SP2KP Kementerian Perdagangan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Kota perlu untuk tetap melakukan operasi pasar dan pasar murah dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat tetap terjamin jika terjadi gejolak harga yang signifikan. Hal tersebut juga memerlukan dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga untuk mendorong dan memandu pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Tim TPID Kota Padang Panjang saat ini telah melakukan koordinasi dan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti TPID Provinsi Sumatera Barat, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, Bulog Cabang Bukittinggi, TTIC Provinsi Sumatera Barat dan TPID kabupaten/kota lain di Sumatera Barat.